

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari sejarah perkembangan bioskop dan perfilman di Indonesia serta sejarah kebijakan perfilman di Indonesia dapat diketahui terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi industri perfilman Indonesia. Pada tahapan produksi misalnya ada sejumlah permasalahan yaitu: *pertama*, pemerintah tidak memberikan stimuli untuk mendorong perkembangan industri perfilman Indonesia. *Kedua*, terdapat beragam pajak yang dikenakan pada film Indonesia. Film Indonesia dikenakan beragam pajak yaitu mulai dari bahan baku hingga pajak hiburan yang dikenakan pada bioskop, sedangkan pada film impor hanya dikenai pajak impor.

Pada tahapan distribusi, terdapat sejumlah permasalahan yaitu: *pertama*, terjadi konsentrasi kepemilikan bioskop dimulai dengan terjadinya monopoli pada bisnis film impor. Terjadinya monopoli impor film telah menempatkan pengusaha bioskop ditempatkan pada posisi lemah dalam *bargaining position* dengan distributor/pengedar film impor. *Kedua*, pola penyebaran bioskop di Indonesia secara demografis yang tidak merata dan terpusat di kota besar dan mayoritas di Pulau Jawa berimbas pada sulitnya film Indonesia untuk bersaing dengan film impor khususnya Hollywood. Kebijakan perfilman Indonesia yang mengalami pasang surut juga menjadi catatan tersendiri. Sejumlah “kelalaian” yang pernah terjadi sebelumnya, seperti pada masa orde lama dan pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), yang mana tidak ada ada satu departemen

pun yang ditunjuk untuk mengurus masalah perfilman, perlu mendapatkan perhatian serius dalam penentuan regulasi perfilman agar jangan sampai terulang lagi.

Karenanya untuk mengembangkan perfilman Indonesia sebagai sebuah industri memerlukan pemahaman tentang berbagai konsep industri budaya. Pengembangan film sebagai sebuah industri memerlukan kebijakan yang komprehensif meliputi semua tahapan dalam proses film sebagai industri budaya yang meliputi produksi, distribusi, promosi dan konsumsi.

Dari panjangnya perjalanan sejarah Bioskop dari Perancis, masuk ke Indonesia sampai ke Medan. Bioskop dan industri perfilman sudah melewati berbagai macam tantangan zaman, dan masih tetap eksis sampai sekarang. Kehadiran bioskop dengan segala fasilitas serta kemajuan teknologinya, tetap menjadikannya sebuah tempat hiburan yang informasi bagi masyarakat. Bioskop hadir sebagai penggerak roda ekonomi, budaya, dan pendidikan yang luar biasa. Selain berguna sebagai sarana hiburan, bioskop juga menyumbang andil yang banyak untuk kemajuan pembangunan sebuah daerah. Terakhir, dengan adanya bioskop pola pikir masyarakat semakin luas dan berkembang.

## **5.2 Saran**

Kebijakan perfilman dari sisi produksi memerlukan serangkaian perbaikan. Yang pertama, pemerintah dan DPR perlu membuat regulasi perfilman yang mempertimbangkan aspek-aspek yang terdapat dalam kajian industri budaya yang meliputi tahapan produksi, distribusi, promosi hingga konsumsi. Kedua, perlu diterapkan kebijakan yang mendukung seluruh tahapan dalam proses industri

budaya yang mencakup tahapan produksi, promosi, distribusi hingga konsumsi.

Pada tahapan produksi diperlukan dukungan yang maksimal dari pemerintah untuk keberadaan sekolah-sekolah film yang berkualitas dan membantu kesulitan modal yang dihadapi perfilman Indonesia dengan cara mengumpulkan dana dari berbagai pihak swasta yang disebut *fund of funds*. Selain itu perlu adanya perbaikan terhadap kebijakan sensor film. Kebijakan sensor film hendaknya lebih beradaptasi dengan proses pembuatan film sehingga tidak merugikan industri film Indonesia.

Dari sisi hilir, yang meliputi distribusi, promosi dan konsumsi juga perlu ada serangkaian pembaruan kebijakan. Dari sisi distribusi, perlu adanya kebijakan yang mencegah terjadinya praktek oligopoli dan membuka peluang untuk konsep model bisnis bioskop lainnya berupa bioskop yang menyatu dengan kegiatan komunitas misalnya. Di sisi hilir padatahapan promosi perlu adanya pelibatan berbagai komponen pemerintahan yang lain dalamkoordinasi Badan Ekonomi Kreatif sebagai penanggungjawab dalam mempromosikan film-film Indonesia baik dalam promosi domestik maupun internasional. Pada tahap konsumsi, perlu ada perhatian pemerintah untuk meningkatkan kebanggaan penonton untuk menonton film Indonesia. Kebanggaan menonton film Indonesia tersebut tidak hanya berlaku untuk penonton Indonesia merupakan juga untuk penonton di luar Indonesia. Untuk mencapai tataran tersebut membutuhkan strategi ekspansi budaya yang menyeluruh sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Berbagai hal mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah tersebut hendaknya merupakan fokus perhatian pula dalam revisi UU Perfilman yang sedang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah